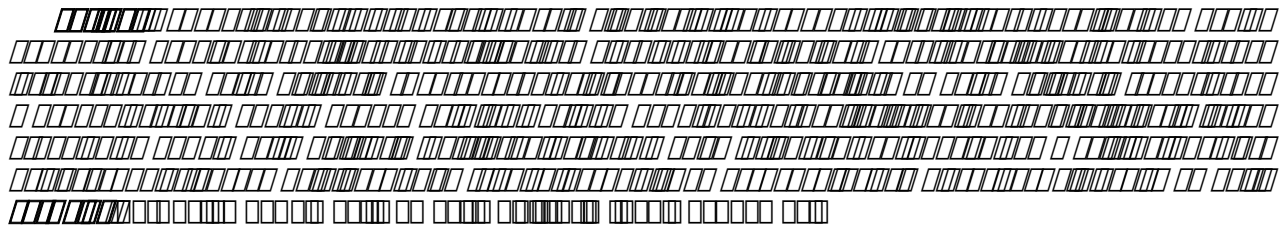




## PEMBERDAYAAN MAJELIS TA'LIM PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF MANAJEMEN DAKWAH

*Abdul Basit<sup>\*)</sup>*

<sup>\*)</sup> Penulis adalah doktor (Dr.) dalam bidang Dakwah dan Komunikasi serta dosen Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto



### PENDAHULUAN

Implikasi dari perubahan yang ada tidak saja membawa pengaruh pada *performance*, pola pikir, dan gaya hidup (*life style*), melainkan juga berimbas pada perubahan cara beragama di kalangan masyarakat. Belajar al-Qur'an, pada zaman dahulu, biasanya langsung melalui guru-guru ngaji yang ada di lingkungannya. Sekarang ini, masyarakat belajar mengaji al-Qur'an, selain dengan guru-guru ngaji, bisa juga belajar langsung melalui kaset, komputer, dan internet. Demikian juga, dalam mencari hadits-hadits atau materi-materi keagamaan, orang-orang sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi.

Adanya perubahan ini merupakan tantangan sekaligus tuntutan bagi para aktivis lembaga dakwah untuk menyesuaikan perkembangan tersebut. Para aktivis perlu mengemas dakwah secara profesional dan berkualitas. Jika tidak, dakwah akan ditinggalkan oleh jama'ahnya dan Islam akan kehilangan daya tariknya.

Majelis ta'lim sebagai salah satu lembaga dakwah yang memiliki peran strategis dalam memperkuat wacana dan pengamalan ajaran Islam perlu menyesuaikan dan mengikuti perubahan yang terjadi pada masyarakat dengan melakukan proses pemberdayaan<sup>1</sup> personal, kelembagaan dan pranata sosialnya. Berkenaan dengan hal tersebut, pada tulisan ini akan dijelaskan tentang pemberdayaan majelis ta'lim perempuan dengan alasan: *Pertama*, majelis ta'lim perempuan lebih eksis dibandingkan dengan majelis ta'lim laki-laki atau gabungan antara laki-laki dengan perempuan. *Kedua*, majelis ta'lim perempuan yang memiliki potensi luar biasa kurang mendapatkan sentuhan dari sisi manajemen dakwah yang modern sehingga aktivitasnya terkesan begitu monoton dan menjenuhkan. *Ketiga*, sumbangsih kaum perempuan dalam peran sosial politik di masyarakat kurang terorganisir dengan baik sehingga masalah-masalah sosial yang menimpa perempuan kerap kali terjadi di masyarakat, seperti kekerasan di rumah tangga, pelecehan seksual, penyalahgunaan tenaga kerja wanita, dan sebagainya.

Sebelum dibahas lebih jauh tentang pemberdayaan majelis ta'lim perempuan, terlebih dahulu penulis akan menguraikan urgensi manajemen dalam dakwah. Uraian ini dimaksudkan untuk memetakan secara global betapa pentingnya manajemen dalam mengemas kegiatan dakwah, termasuk dalam memberdayakan majelis ta'lim perempuan.

### URGENSI MANAJEMEN DALAM DAKWAH



Manajemen sebagai ilmu lahir dari dunia Barat,<sup>2</sup> tetapi inspirasi tentang perlunya manajemen dalam berbagai hal bersumber dari al-Qur'an. Dalam Surat *al-Hasyr* ayat 18 berbunyi:

Dalam ayat tersebut, ada tiga hal pokok yang dapat diambil pelajaran tentang pentingnya manajemen dalam kehidupan manusia. *Pertama*, Allah memerintahkan orang yang beriman untuk merencanakan masa depan. *Kedua*, dalam merencanakan masa depan hendaknya memperhatikan situasi dan potensi diri berdasarkan ajaran Allah. *Ketiga*, ada tujuan yang hendak dicapai ketika merencanakan masa depan, baik tujuan jangka panjang maupun jangka pendek.

Jika ayat tersebut diterapkan dalam konteks dakwah, maka keberadaan dan peran manajemen amat dibutuhkan. Seorang da'i atau lembaga dakwah ketika hendak melakukan dakwah perlu merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan cara mempertimbangkan kebutuhan dasar *mad'u*, kemampuan da'i atau lembaga dakwah, kemanfaatan yang diperoleh, dan dukungan masyarakat. Jangan sampai terjadi, *mad'u* yang sedang lapar diberikan ceramah dan kaum tani yang butuh modal dan keterampilan, hanya diberikan motivasi saja.

Apabila manajemen dakwah diabaikan dalam aktivitas dakwah tentu akan berimplikasi pada keberlangsungan dakwah. Aktivitas dakwah akan mengalami penurunan, efektivitas dakwahnya tidak akan tercapai, dakwah akan ditinggalkan oleh umatnya, dan lebih jauh lagi agama Islam menjadi mandul atau tidak bisa berperan dalam kehidupan masyarakat.

Untuk terciptanya manajemen dakwah yang baik, maka diperlukan adanya organisasi dan kepemimpinan yang solid. Dalam organisasi dakwah akan berfungsi subsistem dakwah.<sup>3</sup> Artinya, kesuksesan dakwah tidak hanya ditentukan oleh satu orang saja. Da'i atau lembaga dakwah, *mad'u*, materi, media, metode dan lingkungan sebagai sub sistem dakwah memiliki peran masing-masing sehingga menjadi satu kesatuan dalam menyukseskan kegiatan dakwah. Da'i atau lembaga dakwah sebagai pemimpin/kepemimpinan merencanakan kegiatan dakwah dengan *men-design* materi, metode dan media yang disesuaikan dengan *mad'u* dan lingkungan yang ada.

Dengan demikian, keberhasilan dakwah tidak hanya diukur pada semarak atau berjalannya aktivitas dakwah. Kesenambungan dan kesesuaian antara rencana, proses dan tujuan dakwah merupakan indikator yang dapat dijadikan ukuran dalam keberhasilan dakwah. Karenanya, dakwah membutuhkan adanya gerakan yang terorganisir secara profesional dan modern.

## GERAKAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Keadilan dan kesetaraan gender menjadi wacana penting di kalangan intelektual di Timur Tengah sejak awal abad ke-19. Qasim Amin, salah seorang pionir kebangkitan intelektual Arab menunjukkan keprihatinan terhadap posisi perempuan. Dia mengatakan "*Islam declared women's freedom and emancipation, and granted women all human rights during a time when women occupied the lowest status in all societies*".<sup>4</sup> Setelah Qasim Amin, bermunculan intelektual Muslim lain yang memiliki keprihatinan terhadap posisi perempuan. Gema keprihatinan itu secara berkelanjutan mengalami perkembangan sejalan dengan munculnya gerakan feminisme dan ide-ide kesetaraan gender (*gender equality*) di belahan dunia Barat.

Wacana ini terus mengalami pertumbuhan di Timur Tengah dan negara-negara Islam lainnya, termasuk Indonesia. Organisasi Nasyiatul Aisyah dan Muslimat NU telah melakukan gerakan pemberdayaan perempuan. Gerakan Sopo Tresno yang dipelopori oleh Nyai Dahlan, yang berusaha memberi kesempatan kepada perempuan untuk menuntut ilmu merupakan terobosan intelektual yang hebat untuk zamannya pada saat itu (sebelum tahun 1914). Demikian juga, perjuangan kaum perempuan NU (tahun 1946) untuk menggugat dominasi kaum laki-laki di organisasi<sup>5</sup> telah mengalami kesuksesan yang besar dengan lahirnya Muslimat NU.<sup>6</sup> Kesadaran dan kemunculan dua ormas Islam tersebut dalam memberdayakan perempuan tidak semata-mata dipengaruhi oleh wacana keadilan dan kesetaraan gender yang berkembang di Timur Tengah. Akan tetapi, hal itu lebih merupakan hasil akumulasi dari transformasi dalam kehidupan sosial, politik dan keberagamaan yang berlangsung pada saat itu di Indonesia. Oleh karena itu, kontribusi Nasyiatul Aisyah dan Muslimat NU sebagai peletak akar kuat dalam pemberdayaan kaum perempuan tidak bisa dikesampingkan.



Gerakan pemberdayaan perempuan mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 1980-an ketika di Indonesia tumbuh gerakan gender dan pembangunan (*gender and development* yang disingkat GAD). Gerakan ini mengembangkan strategi PUG (pengarusutamaan gender) yang bertujuan menjadikan gender sebagai arus utama (*mainstream*) dalam pembangunan dengan sasaran utama kebijakan negara, aksi masyarakat, serta institusi negara dan masyarakat.

Selanjutnya, dalam perkembangan berikutnya, secara struktural, munculnya pusat studi wanita (PSW) dan pusat studi gender (PSG) di Perguruan Tinggi dan di beberapa instansi menunjukkan betapa kuatnya gerakan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Demikian juga, di kalangan masyarakat muncul beberapa lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di jalur yang sama, seperti P3M (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat), Fahmina, Rifka Annisa, dan sebagainya.

Munculnya berbagai organisasi yang bergerak dalam pemberdayaan perempuan belum bisa dijadikan standar bahwa gerakan perempuan telah berhasil dalam memberdayakan perempuan Indonesia. Belum ada data yang menunjukkan secara komprehensif bahwa program yang telah dijalankan oleh organisasi-organisasi yang bergerak di bidang perempuan telah berjalan secara efektif dan perempuan Indonesia telah berdaya serta memiliki peran sosial-politik dan sosial-keagamaan yang signifikan.

Fenomena yang ada, banyak perempuan Indonesia yang belum memahami tentang hak-hak yang mesti diterima sebagai perempuan. Perlakuan kasar dan semena-mena dari laki-laki dipandang sebagai bagian dari kodrat yang mesti diterimanya. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya pasrah dan mengadu kepada Tuhan. Kalaupun perempuan itu tahu bahwa perlakuan kasar itu bertentangan dengan agama dan hak asasi manusia, lantas apa ada organisasi yang peduli dengan persoalan yang menimpanya dan kalau pun ada, mereka tidak mengetahui tentang mekanisme yang mesti ditempuhnya.

Perempuan-perempuan Indonesia juga ada sebagian yang datang ke majelis-majelis ta'lim dan forum-forum ilmiah, tetapi mereka lebih banyak berbicara tentang kehidupan akhirat. Kalaupun berbicara tentang masalah hidup lebih banyak retorika dan bersifat abstrak. Mereka tidak mengetahui kalau saudaranya sesama muslim yang menjadi anggota pengajian tersebut tidak mampu menyekolahkan anaknya, tidak bisa membelikan baju seragam, dan terkadang tidak bisa makan. Bahkan, lebih tragis lagi, ibu-ibu atau remaja putri sering ikut pengajian, tetapi mereka tidak bisa membaca al-Qur'an dan tidak tahu yang termasuk rukun shalat dan sunat shalat.

Fenomena lain yang menjadi pemandangan sehari-hari, banyak waktu yang dihabiskan oleh kaum Hawa ini dengan percuma. Mereka hanya jalan sana jalan sini tanpa ada tujuan yang jelas. Terkadang, mereka hanya *ngerumpi* untuk menghilangkan kepenatan dalam rumah tangga. Kondisi demikian bisa jadi karena mereka tidak ada kesibukan yang berarti. Mereka dibiarkan saja tanpa ada yang mau turun-tangan untuk memberikan pekerjaan, permodalan, atau pembinaan. Bank-bank akan berpikir 1000 kali untuk bisa membantu atau memberikan modal mereka. Begitu juga, lembaga-lembaga donatur lain, akan berpikir ulang untuk membantu mereka karena mereka tidak memiliki keterampilan dan pengetahuan tentang usaha.

Begitulah fenomena-fenomena yang ada pada perempuan Indonesia pada umumnya. Dalam kondisi semacam itu, apakah hanya bisa berwacana dengan teori-teori yang rumit, ataukah kita hanya melakukan gerakan organisasi yang bersifat kamufase? Di sinilah penting untuk melakukan evaluasi dan koreksi terhadap gerakan perempuan. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengelola dakwah secara profesional. Dakwah merupakan kebutuhan dasar manusia. Kefitrihan manusia yang diperoleh melalui sanubarinya (*fitrah maqbulah*) akan berfungsi manakala ada proses dakwah yang mengajarkan tentang kefitrihan yang diturunkan (*fitrah munajjalah*) berupa al-Qur'an dan al-Sunnah. Sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Muhammad:

Artinya: "Kami telah diberitahu dua hadits oleh Rasulullah Saw. Aku menyaksikan bahwa salah satu dari kedua hadits tersebut (sudah terjadi) dan aku masih menunggu (terbuktnya hadits) yang satu lagi. (Pada hadits yang pertama) beliau telah memberitahu kami bahwa amanat turun di relung hati orang-orang (sejak dilahirkan). Kemudian al-Qur'an turun, sehingga mereka bisa mengetahui (ajaran agama) dari al-Qur'an dan juga mengetahui dari sunnah" (H.R. Hudzaifah).



## MANAJEMEN DAKWAH PEREMPUAN

Dakwah sebagai kekuatan intelektual dan spiritual layak dijadikan sebagai alternatif untuk memberdayakan manusia (perempuan menjadi bagian di dalamnya). Apakah artinya dakwah yang berarti perubahan sosial,<sup>8</sup> manakala dakwah jauh dari persoalan kemanusiaan. Padahal, al-Qur'an jelas-jelas menyatakan bahwa dakwah adalah pembebasan manusia dari berbagai penindasan, tirani, dan hal-hal yang membelenggu kehidupan manusia.

*"Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik"* (QS. [3] :110).

Dakwah, menurut Abdul Munir Mulkan, terlalu sibuk "ngurusi Tuhan", bukan manusia. Akibatnya, dakwah gagal mengembangkan daya rasional dan sikap empiris.<sup>9</sup> Menurut John L. Esposito, dakwah harus dapat menciptakan dan bukan mengikuti situasi karena dakwah sangat menekankan pada ketepatan metode.<sup>10</sup> Bahkan, menurut Amin Islahi yang dikutip oleh Larry Poston menyatakan *"the prophets never insisted on any one exclusive method in their missionary work"*<sup>11</sup> (para Nabi tidak pernah berhasrat untuk menggunakan satu metode tertentu saja dalam kegiatan dakwah mereka). Tugas umat Islam yang terpenting adalah menyusun strategi dan teknik yang variatif dan efektif dalam menyampaikan dakwah kepada masyarakat sehingga benar-benar diterima dan dilaksanakan. Dakwah perlu dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut ini ada beberapa langkah yang bisa dipakai dalam mendinamisir gerakan dakwah perempuan. *Pertama*, dalam melaksanakan aktivitas dakwah, pelaksana dakwah harus membuat perencanaan dakwah yang sistematis dan terpadu. Di dalam al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar merencanakan segala sesuatu, termasuk dakwah, untuk kepentingan masa depan yang lebih baik dan menjanjikan (QS. [59] : 18). Ada beberapa keuntungan manakala aktivitas dakwah dibuat perencanaan dengan baik,<sup>12</sup> yaitu:

1. Kegiatan dakwah pada hakekatnya merupakan kegiatan yang berkesinambungan. Tidak akan berhasil tujuan dakwah manakala kegiatan itu tidak direncanakan secara sistematis;
2. Mengingat kegiatan dakwah merupakan kegiatan yang multi-dialog atau memiliki ragam cara, maka aktivitas dakwah dilakukan dengan cara mengkombinasikan berbagai dialog. Untuk itulah diperlukan perencanaan secara matang dan terpadu;
3. Dengan perencanaan yang baik akan terhindar dari kegiatan yang itu-itu juga sehingga terhindar dari adanya pemborosan energi, waktu, dan dana; dan
4. Keterbatasan seorang pelaksana dakwah dalam informasi dan ilmu-ilmu bantu yang diperlukan untuk penyusunan perencanaan dakwah akan dapat diatasi secara bersama, karena kegiatan perencanaan adalah suatu kegiatan kolektif.

Perencanaan yang baik tentunya bertitik tolak dari data empiris yang berkembang di masyarakat (objek dakwah). Perencanaan tidak berangkat dari kertas kosong atau tumpukan buku yang jauh dari kepentingan masyarakat. Perencanaan berangkat dari kebutuhan apa saja yang mendesak dan primer dari objek dakwah, problem yang dihadapi oleh masyarakat, dan yang diharapkan oleh mereka dari aktivitas dakwah. Melalui data tersebut, maka akan lahir model-model, metode-metode, materi-materi dan medium-medium yang cocok dipergunakan di kalangan masyarakat yang menjadi objek dakwah. Dakwah tidak dikesani sebagai kegiatan yang verbalistik, asal-asalan dan penuh bujuk rayuan dari para aktor dakwah. Dakwah menjadi kegiatan yang dapat memahami kebutuhan manusia dan membebaskan mereka dari beban-beban yang selama ini dihadapi oleh masyarakat.

*Kedua*, menyusun strategi dakwah. Ada dua strategi utama dalam pengembangan dakwah, yaitu strategi *internal-personal* dan strategi *external-institusional*.<sup>13</sup> Strategi *internal-personal* adalah strategi yang menekankan kepada pembangunan atau peningkatan kualitas kehidupan individu. Adapun strategi *external-institusional* adalah strategi yang me-



nekankan pada pembangunan struktur organisasi masyarakat. Dua strategi tersebut dalam aplikasinya tidak berjalan secara hirarkis atau terpisah, melainkan berjalan secara beriringan dan saling mengisi (bersifat komplementer).

Strategi *internal-personal* dapat dikembangkan melalui aktivitas-aktivitas dakwah di majelis ta'lim, halaqoh, kelompok tarekat, tabligh akbar, konseling dan sebagainya. Dalam hal ini, yang perlu diperbaiki yakni menyangkut muatan materi dan kiat-kiat yang efektif agar kegiatan dakwah dapat dirasakan manfaatnya. Materi yang diberikan kepada *mad'u* tidak hanya sebatas persoalan fikih dan akidah, tetapi lebih jauh pada persoalan yang terkait dengan muamalah, etos kerja, gender, politik, kesadaran masyarakat dan bernegara.

Demikian juga, kiat-kiat atau metode penyampaian perlu dilakukan perubahan. Metode ceramah (*lecturing*) mestinya diimbangi dengan penggunaan media seperti LCD, papan tulis, dan catatan makalah atau dengan menggunakan "kitab kuning". Selain itu, metode dakwah bisa dikembangkan kepada metode-metode yang lebih bersifat partisipatif, artinya *mad'u* dapat dilibatkan dalam mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

Sementara itu, dalam pengembangan strategi dakwah yang bersifat *external-institusional*, aktivitas dakwah dapat memasuki berbagai lini kehidupan yang ada di masyarakat. Dakwah dapat memasuki wilayah pendidikan dengan cara memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas dan profesional. Dakwah dapat memasuki dunia kesehatan dengan memiliki rumah sakit atau lembaga pengobatan yang memiliki manajemen dengan baik. Dakwah dapat memasuki sektor ekonomi dengan memiliki lembaga perekonomian dan mengembangkan ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam. Akhirnya, dakwah juga dapat memasuki wilayah politik, sosial dan sebagainya.

*Ketiga*, mempersiapkan subjek atau pelaku dakwah yang profesional. Rencana dan strategi yang baik tidak akan berjalan dengan baik manakala para pelakunya tidak memiliki kapabilitas dan kompetensi yang mumpuni.<sup>4</sup> Perguruan tinggi yang *concern* dalam menyiapkan sumber daya dakwah tampaknya belum banyak diminati oleh masyarakat. Kondisi demikian bisa disebabkan karena masyarakat masih memandang bahwa bidang profesi dakwah tidak bisa menjanjikan masa depan yang cerah bila dibandingkan dengan bidang lainnya. Selain itu, perguruan tinggi dakwah juga masih diliputi masalah dalam pengembangan keilmuannya yang cenderung normatif-doktrinal.

Organisasi-organisasi yang bergerak di bidang dakwah juga kurang mempersiapkan para pelaku dakwah secara profesional. Organisasi hanya melakukan kaderisasi secara alamiah, kurang terencana secara baik dan pemberdayaannya yang masih lemah. Mereka menyelenggarakan pelatihan bagi para kadernya, tetapi dalam prosesnya kadang terkesan kurang terencana secara matang sehingga hasilnya tidak memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dakwah. Belum lagi *follow up* (tindak lanjut) dari hasil *per-training*-annya yang tidak berjalan. Kader-kader tidak merasakan dan mengetahui apakah hasil *training* ini dapat memberi perubahan dalam aktivitas dakwah atau tidak. Selama ini, jarang terjadi evaluasi dari hasil *training* dan *follow up*.

*Keempat*, mempersiapkan dan mengembangkan keahlian yang bersifat teknis sesuai dengan tingkat kemampuan dari objek dakwah, sebagaimana sabda nabi Muhammad Saw, "*Kami diperintah supaya berbicara kepada manusia menurut kadar akal (kecerdasan) mereka masing-masing*" (H.R. Muslim). Langkah ini dilakukan dengan cara memperhatikan tingkat perkembangan masyarakat yang menjadi objek dakwah. Apakah dakwah dilakukan di masyarakat kota, transisi atau desa? Media apa yang cocok digunakan di kalangan masyarakat yang akan didakwahi, apakah media lisan, tulisan, visual, audiovisual atau media lainnya? Materi apa yang layak diberikan kepada *mad'u*, apakah menyangkut akidah, ibadah, muamalah, politik dan sebagainya. Alat apa yang digunakan untuk melakukan evaluasi dari berbagai aktivitas dakwah. Semua itu, membutuhkan data dan pusat informasi yang mesti dimiliki oleh lembaga dakwah. Oleh karena itu, mempersiapkan dan mengembangkan langkah terakhir ini perlu melibatkan mitra dakwah dan perkembangan teknologi komunikasi.

## MAJELIS TA'LIM PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAANNYA

Majelis ta'lim perempuan sebagai lembaga pendidikan non formal di masyarakat merupakan sarana potensial untuk menyampaikan dakwah Islam dan membina umat. Jumlahnya amat banyak, hampir tersebar di seluruh provinsi,





kabupaten/kota, bahkan hingga tingkat RW dan RT sekalipun. Majelis ta'lim perempuan menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas atas, kelas menengah hingga kelas bawah.

Amat disayangkan keberadaan majelis ta'lim perempuan manakala potensi besar yang dimilikinya tidak diberdayakan secara maksimal. Majelis ta'lim perempuan dijalankan sebagai kegiatan rutin belajar mengajar tanpa arah dan tujuan yang jelas. Mereka hadir bersama tiap minggu, dua mingguan, atau satu bulan sekali. Kegiatan umum yang dilakukan adalah mengadakan zikir, shalawat, membaca al-Qur'an, dialog keagamaan, *taushiyah*, *hadroh*, dan terkadang ada arisan. Semua dilakukan sebagai kegiatan rutin, tanpa ada evaluasi dan pengembangan ke arah pemberdayaan potensi personal, kelembagaan dan pranata sosialnya. Untuk melakukan perubahan secara *sustainable*, majelis ta'lim perempuan lebih berdaya guna diperlukan pionir-pionir yang memiliki semangat, wawasan dan kepedulian yang tinggi, terutama dari para pengurus lembaga majelis ta'lim perempuan dan para pelaksana dakwahnya.

Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengelolaan majelis ta'lim perempuan. Dalam perspektif manajemen, tugas manajemen tidak hanya mengelola organisasi saja, tetapi mengelola diri dan mengelola relasi antarindividu juga menjadi bagian dari tugas manajemen.<sup>15</sup> Oleh karena itu, pemberdayaan majelis ta'lim perempuan perlu dilakukan secara komprehensif baik menyangkut manajemen personal, kelembagaan dan pranata sosialnya. Langkah yang bisa dilakukan, yaitu:

## 1. Pemberdayaan Pengurus Majelis Ta'lim Perempuan

Bagi majelis ta'lim perempuan yang belum memiliki struktur yang jelas perlu kiranya dilakukan pembentukan struktur dan pembuatan aturan yang jelas sehingga masing-masing pengurus mempunyai rasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing. Pembentukan struktur kepengurusan amat urgen untuk dilakukan. Mengingat majelis ta'lim perempuan memiliki anggota banyak yang didalamnya terdapat perbedaan-perbedaan baik dari sisi pengetahuan, pemahaman, tingkat religiusitas, status sosial, dan sebagainya. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut diperlukan adanya penggerak, pemersatu, dan pengayom yang dapat menyatukan persepsi di antara para anggota.

Bagi majelis ta'lim perempuan yang telah ada struktur kepengurusannya, perlu dimaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pengelola. Kelemahan yang ada selama ini, pengurus majelis ta'lim perempuan hanya berperan sebagai koordinator dalam kegiatan belajar-mengajar. Adapun yang perlu dikembangkan adalah kemampuan manajerial, wawasan masa depan, kreativitas pengurus sehingga dalam mengelola majelis ta'lim mampu mengembangkan dan memaksimalkan potensi yang ada baik potensi yang dimiliki oleh lembaga majelis ta'lim itu sendiri maupun potensi yang ada pada para anggotanya. Untuk itulah dalam setiap majelis ta'lim hendaknya dibangun proses kepemimpinan yang solid dan terorganisir.

Dalam memberdayakan pengurus majelis ta'lim, keterlibatan perguruan tinggi Islam, lembaga swadaya masyarakat, pusat studi gender, pusat studi wanita, dan lembaga dakwah lainnya amat diperlukan. Para pengurus majelis ta'lim perlu diorientasikan pada bentuk-bentuk dakwah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, penegakan HAM, peduli lingkungan, penegakan keadilan dan kesetaraan gender, serta berbagai persoalan sosial kemanusiaan yang lain. Mereka perlu mendapatkan advokasi atau pendampingan secara intensif hingga mereka mampu memberdayakan dirinya dan majelis ta'lim yang dikelolanya.

## 2. Peningkatan Kompetensi Da'i

Ada empat kompetensi yang mesti dimiliki oleh da'i, yaitu kompetensi personal, sosial, substantif, dan metodologis. Peningkatan kompetensi yang bersifat personal dan sosial dapat dilakukan secara langsung dengan cara menumbuhkan kesadaran pada dirinya bahwa da'i merupakan seorang *prominent figure* (tokoh terkemuka) di masyarakat. Karenanya, segala tutur kata, sikap, dan perilakunya menjadi sorotan masyarakat. Menumbuhkan kesadaran diri dapat dilakukan dengan cara muhasabah (diri cermin),<sup>16</sup> meminta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk menilai diri da'i seperti yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah dengan membentuk dua saudara, atau mengikuti training seperti yang dilakukan oleh *ESQ training*.



Sementara itu, peningkatan kompetensi substantif, diupayakan secara terus-menerus. Da'i jangan merasa puas dan cukup dengan keilmuan yang dimilikinya sekarang. Ilmu senantiasa mengalami perkembangan sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang *notabene* mengalami perkembangan sesuai dengan tuntutan zaman dan situasi yang terus berubah dari waktu ke waktu, bahkan dari menit ke menit. Waktu era orde lama, memakai dasi merupakan perbuatan yang dilarang oleh sebagian umat Islam karena dianggap meniru perilaku orang Barat (Belanda). Tetapi, pada era sekarang banyak kiai atau ustadz yang banyak memakai dasi dalam kegiatan-kegiatan dakwah.

Apalagi melihat kecenderungan masyarakat sekarang ini dan pada masa depan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan hidupnya dengan menggunakan cara berpikir rasional dan pemanfaatan teknologi tinggi. Dalam hal ini, da'i tidak hanya dituntut untuk menguasai ilmu-ilmu yang berbasis agama saja, melainkan juga ilmu-ilmu dasar yang mendukung kebutuhan hidup manusia seperti ilmu ekonomi, politik, psikologi, dan sosiologi. Da'i dituntut mengaitkan ilmu-ilmu agama yang dimiliki dengan ilmu-ilmu lainnya atau mengaitkan dengan tema-tema yang sedang *up to date* seperti tema demokrasi, HAM, *good governance*, masyarakat madani dan sebagainya. Dengan cara tersebut, tidak lagi kesan da'i hanya menyampaikan materi-materi dakwah yang tidak jauh dengan surga dan neraka atau *mad'u* menjadi enggan untuk menghadiri majelis ta'lim/pengajian karena materinya tidak berhubungan langsung dengan kebutuhan *mad'u* pada era kekinian.

Sebenarnya, untuk mendapatkan materi-materi dasar yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia tidak harus melalui pendidikan formal yang tinggi, tetapi jika memungkinkan memang lebih baik. Da'i dapat memanfaatkan buku-buku bacaan yang dimiliki oleh anak-anak, majalah-majalah, menonton televisi, mendengarkan radio, dan bisa mengikuti forum-forum semacam ini. Walhasil, da'i dituntut untuk banyak membaca sebagai sumber utama dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya.

Selanjutnya, berkaitan dengan peningkatan kompetensi metodologis dilakukan dengan terus menerus memperhatikan kebutuhan *mad'u* yang amat mendesak. Sekurang-kurangnya, da'i dalam menyampaikan pesan-pesan harus memperhatikan kebutuhan psikologis dan sosiologis dari *mad'u*. Lebih baik lagi, apabila da'i dapat mengenali karakteristik dari *mad'u* seperti tingkat pendidikan, ideologi yang digunakan, sistem nilai/tradisi yang dipakai, dan pemahaman keagamaannya. Pengenalan ini dimaksudkan agar sesuatu yang disampaikan oleh da'i dapat diterima oleh *mad'u* dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pada kaitan itu, ada banyak kebutuhan manusia. Kebutuhan psikologis manusia berupa kebutuhan yang bersifat kognitif dan afektif. Kebutuhan yang bersifat kognitif dapat berupa kebutuhan akan informasi dan kebutuhan untuk menambah keyakinan atau kepercayaan. Adapun kebutuhan yang bersifat afektif adalah kebutuhan yang menyangkut emosional subyektif seseorang terhadap suatu obyek baik senang, sedih, takut, malu, dan sebagainya. Kebutuhan sosiologis adalah kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan rasa aman dapat berupa kebutuhan makan, sandang, dan papan. Sedangkan, kebutuhan aktualisasi diri dapat berupa pengakuan dari orang lain akan eksistensinya dan kebutuhan untuk dilibatkan dalam berbagai aktivitas masyarakat.

Dalam praktik, memang terkadang tidak mudah untuk membedakan satu kebutuhan dengan kebutuhan yang lainnya. Pastinya, janganlah da'i memaksakan materinya kepada seluruh *mad'u*. Materi dakwah harus menyesuaikan dengan *mad'u*-nya (). Untuk itulah, da'i perlu mengenal kecenderungan masyarakat, situasi dan kondisi, serta waktu menyampaikan. Sebagai contoh, orang yang terpelajar atau masyarakat perkotaan membutuhkan penguatan keyakinan atau informasi tentang agama yang dijalaninya sehingga tidak bertabrakan dengan kehidupan modernnya seperti adanya asuransi, pembelian saham, donor ginjal, kehidupan sufi modern, dan sebagainya.

Contoh lain, ketika berbicara di depan jama'ah tahlilan dengan jama'ah arisan harus dibedakan baik dari sisi materi, bahasa tubuh maupun intonasi pembicaraan. Demikian juga berbicara di depan orang banyak (di lapangan) dengan berbicara di depan orang yang sedikit (di dalam kelas) harus dibedakan. Orang yang di lapangan cenderung emosional, sedangkan orang yang berada di dalam kelas cenderung rasional. Da'i juga memperhatikan waktu-waktu atau tanggal-tanggal penting seperti hari HIV/Aids sedunia, hari buruh sedunia, hari kebangkitan nasional, hari pendidikan, hari lingkungan, dan sebagainya.



Sesuai materi-materi yang disampaikan dengan peristiwa-peristiwa yang ada sehingga pendengar merasa dekat dengan kebutuhannya.

### Memperkuat Mitra Dakwah

Menurut Ali Aziz, penggunaan istilah mitra dakwah lebih dinamis dibandingkan dengan istilah objek dakwah. Para pendakwah menjadi kawan berpikir dan bertindak bersama dengan mitra dakwah. Hubungan ideal pendakwah dan penerima dakwah bukan hubungan subjek dan objek, melainkan sebagai mitra yang saling berbagi pengalaman, pengetahuan dan pemikiran.<sup>17</sup>

Jika pendapat di atas dihubungkan dengan kondisi majelis ta'lim perempuan, yakni hubungan yang terjadi antara pendakwah, pengelola dan anggota majelis ta'lim perempuan seakan-akan ada jarak yang memisahkan di antara mereka. Pendakwah dan pengelola dianggap orang yang paling tahu atau paling suci di antara anggota majelis ta'lim sehingga jarang terjadi adanya proses berbagi pengetahuan, pengalaman dan pemikiran di antara mereka tentang pengembangan majelis ta'lim. Hubungan mereka seperti atasan dengan bawahan. Pelaksana dakwah dan pengelola majelis ta'lim sebagai atasan, sementara anggota adalah bawahan. Mereka "manut" (patuh) saja terhadap apa yang diinginkan dan diperintahkan oleh pendakwah atau pengelola majelis ta'lim. Tidak ada hubungan yang saling mengkritisi dan mendialogkan berbagai hal yang berkenaan dengan kemajuan majelis ta'lim dan pengamalan ajaran agama.

Padahal, dalam setiap majelis ta'lim perempuan, masing-masing anggota memiliki kelebihan dan kekurangan. Bisa jadi ada sebagian anggota yang kurang memiliki kemampuan dalam memahami ajaran agama, tetapi ia memiliki kelebihan harta. Ada sebagian lain yang mungkin memiliki kelebihan dalam wawasan dan pengetahuan lain yang diperlukan oleh kaum perempuan seperti ilmu kesehatan, ilmu politik, ilmu hukum dan sebagainya.

Ketidakmampuan pengelola dan pendakwah dalam membaca keragaman anggota inilah yang menjadi salah satu penyebab banyak kegiatan majelis ta'lim menjadi begitu monoton dan menjenuhkan. Para pendakwah dan pengelola kurang mengapresiasi kemampuan dan kelebihan yang dimiliki oleh anggota. Hal ini bisa terjadi manakala persepsi yang dimiliki oleh pendakwah dan pengelola bahwa kegiatan majelis ta'lim hanya kegiatan belajar-mengajar keagamaan an sich.

Dalam konsep Islam, tidak ada dikotomi dalam pencarian ilmu, bahkan dalam menjalani kehidupan. Islam selalu menyeimbangkan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, kebutuhan jasmani dan ruhani, serta ilmu pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan umum. Bertolak dari pemahaman tersebut, berarti kegiatan yang diadakan di majelis ta'lim perempuan semestinya juga mengakomodir keseimbangan tersebut. Kegiatan-kegiatan yang ada di majelis ta'lim perempuan lebih berorientasi pada kegiatan yang multidialogis. Ada kegiatan membaca al-Qur'an, dzikrullah, filantropi (berbagi kasih sayang), bakti sosial, advokasi, penanaman pohon dan berbagai kegiatan lainnya yang bisa diciptakan, dikembangkan dan disesuaikan dengan kemampuan majelis ta'lim.

### 3. Memfungsikan Peran Sosial Politik Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim sebagai salah satu kekuatan sosial politik kurang mendapatkan sentuhan, bahkan jarang diperhitungkan keberadaannya. Anggota majelis ta'lim dianggap sebagai orang-orang yang buta terhadap masalah sosial politik dan bahkan mungkin dianggap *phobia* dengan hal-hal yang berbau politik. Apalagi majelis ta'lim perempuan yang dianggapnya hanya bisa shalawatan, barzanji (membaca kisah-kisah nabi), hadrah, dan arisan.

Jika dicermati dari jumlah perempuan yang terlibat di majelis ta'lim dan tingkat keragaman yang dimiliki, bukan hal yang mustahil manakala majelis ta'lim dijadikan sebagai kekuatan sosial politik. Terlebih lagi majelis ta'lim perempuan memiliki badan koordinasi majelis ta'lim baik pada skala lokal maupun nasional. Apabila mereka berkumpul dan bersatu dalam satu forum, kemudian digerakkan menjadi kekuatan massa, maka keberadaannya tidak bisa diabaikan begitu saja.

Pengalaman Muhammad Yunus di Bangladesh dalam memberdayakan kaum perempuan miskin dengan cara memberikan kredit mikro dan mengalami sukses yang gemilang sehingga mengantarkan dia sebagai peraih hadiah Nobel perdamaian tahun 2006. Dari para perempuan yang lugu dan tidak memiliki keterampilan, mereka diberikan





kepercayaan untuk mendapatkan kredit mikro dari Grameen Bank. Secara perlahan dan pasti, mereka diberdayakan dan diberikan modal sehingga dapat mengubah kehidupan mereka dari miskin menjadi orang yang mampu.<sup>18</sup>

Di Indonesia belum banyak lembaga, partai politik dan ormas Islam yang memiliki kesadaran dan kepedulian untuk memberdayakan potensi sosial politik yang dimiliki majelis ta'lim. Mereka hanya dimanfaatkan pada saat pemilihan anggota legislatif, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa. Setelah jadi mereka ditinggalkan dan tidak diperhatikan sama sekali. Mereka bisa diberdayakan dalam *pilot project* pengembangan usaha ekonomi keluarga, filantropi Islam atau kepedulian social, penegakan keadilan dan kesetaraan gender, dan sebagainya.

## PENUTUP

Majelis ta'lim perempuan sebagai lembaga pendidikan non formal yang ada di masyarakat memiliki potensi dan peran yang besar manakala dapat diberdayakan secara maksimal. Dalam perspektif manajemen, pemberdayaan bukan hanya menyangkut kelembagaan saja, melainkan juga personal dan relasi antaranggotanya. Oleh karena itu, pemberdayaan majelis ta'lim perempuan dapat dilaksanakan secara komprehensif dengan menyentuh aspek personal pengelola, pendakwah dan anggota yang terlibat dalam majelis ta'lim perempuan. Secara kelembagaan, majelis ta'lim perempuan dapat ditingkatkan program kegiatannya dan peran sosial politiknya sehingga dapat mengatasi berbagai persoalan kemanusiaan yang kerap kali menimpa kaum perempuan.

## ENDNOTES

<sup>1</sup> Konsep pemberdayaan (*empowerment*) berangkat dari ide yang menempatkan manusia sebagai subyek dari dunianya sendiri. Pola dasar pemberdayaan ini mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless*. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yaitu: *Pertama*, menekankan pada proses mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. *Kedua*, kesadaran kritis individu untuk mengontrol lingkungannya. Kesadaran kritis dalam diri seseorang dapat dicapai dengan cara melihat ke dalam diri sendiri serta menggunakan apa yang di dengar, di lihat dan di alami untuk memahami apa yang sedang terjadi dalam kehidupannya. A.M.W. Pranaka dan Vidhyandika, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: CSIS, 1996), hal. 56.

<sup>2</sup> Manajemen dalam kacamata Barat diartikan sebagai "*getting things done through people*" (mengupayakan agar sesuatu dapat terlaksana melalui orang lain). Dari pengertian tersebut, manajemen terkait dengan organisasi dan kepemimpinan atau dalam bahasa yang berbeda organisasi amat membutuhkan manajemen dan manajemen membutuhkan peranan dari kepemimpinan. Pandangan Barat tersebut berbeda dengan Islam yang menyatakan bahwa setiap individu adalah pemimpin, sehingga manajemen berawal dari diri sendiri bukan dari orang lain. Dalam *Ulumul Qur'an* Vol. II, No. 6/1990, hal. 19.

<sup>3</sup> Dakwah sebagai sistem digambarkan oleh Ali Aziz seperti tubuh manusia, kepala sebagai pendakwah (da'i), dada sebagai pesan dakwah, tangan sebagai metode dakwah, perut sebagai mitra dakwah, dan kaki sebagai media dakwah. Masing-masing anggota tubuh memiliki fungsi masing-masing, tetapi semuanya mengarah pada satu kesatuan. Dakwah sebagai sistem ini bisa diterapkan manakala dakwah dilakukan secara kelembagaan atau organisasi. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah* (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 205.

<sup>4</sup> Dikutip dalam Charles Kurzman (Ed.), *Modernist Islam 1840-1940* (Oxford: Oxford University Press, 2002), hal. 64.

<sup>5</sup> Di kalangan NU pada saat itu berkembang pemahaman bahwa kehadiran kaum perempuan di organisasi di larang secara *syari'*. karenanya mereka menggugat pemahaman tersebut sehingga dapat terbentuk organisasi Muslimat NU yang berdiri pada tanggal 29 Maret 1946, dalam Mukhtamar NU ke-16 di Purwokerto Jawa Tengah.

<sup>6</sup> Hamidah, "Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU", *Makalah* disampaikan pada acara "Annual Conference" di Bandung pada tanggal 26-30 November 2006.

<sup>7</sup> "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman) bukankah Aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab: 'Betul (Engkau Tuhan kami), kami menjadi saksi (kami lakukan yang demikian itu), agar di hari kiamat kami tidak mengatakan 'sesungguhnya kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Allah)' (QS. al-A'raf[7]: 172).

<sup>8</sup> Dakwah diartikan sebagai perubahan social telah dijadikan wacana sejak diadakan seminar di Yogyakarta seperti yang dijelaskan dalam buku Amrullah Achmad (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: PLP2M, 1983).

<sup>9</sup> Abdul Munir Mulhan, *Teologi Kiri* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2002), hal. 215.

<sup>10</sup> John L. Esposito (Ed.), *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Volume I* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 345.



<sup>11</sup> Larry Poston, *Islamic Da'wah in the West* (New York: Oxford University Press, 1992), hal. 95.

<sup>12</sup> Abdul Munir Mulkhan, *Ideologisasi Gerakan Dakwah* (Yogyakarta: SI Press, 1996), hal. 221-222.

<sup>13</sup> Larry Poston, *Islamic Da'wah...*, (1992), hal. 49.

<sup>14</sup> Ada empat kompetensi yang mesti dimiliki oleh pelaku dakwah yaitu: Kompetensi personal yang berkenaan dengan kepribadian pelaku dakwah yang menjadi daya tarik bagi *mad'u*; kompetensi sosial yang berkenaan dengan kemampuan pelaku dakwah dalam bergaul dengan sesamanya; Kompetensi substantif berkenaan dengan kemampuan pelaku dakwah dalam penguasaan terhadap pesan-pesan atau materi-materi yang akan disampaikan; dan kompetensi metodologis berkenaan dengan kemampuan pelaku dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah secara efektif dan efisien.

<sup>15</sup> Lee Thayer, *Communication and Communication Systems* (Homewood: Richard D. Irwin, Inc, 1968), hal. 19.

<sup>16</sup> Diri cermin adalah istilah yang diperkenalkan oleh Charles Horton Cooley (1922) dengan istilah *looking-glass self* dengan cara kita membayangkan bagaimana kita tampak pada orang lain, kita membayangkan bagaimana orang lain menilai penampilan kita, dan kita mengalami perasaan bangga atau kecewa orang mungkin merasa sedih atau malu. Lihat Joseph A. Devito, *The Interpersonal Communication Book* (New York: Longman, 2001), hal. 60.

<sup>17</sup> Ali Aziz, *Ilmu Dakwah...*, (2009), hal. 263.

<sup>18</sup> Muhammad Yunus, *Bank Kaum Miskin*, Terj. Irfan Nasution (Serpong: Marjin Kiri, 2007).

## DAFTAR PUSTAKA

Achmad, Amrullah (Ed.). 1983. *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: PLP2M.

Aziz, Ali. 2009. *Ilmu Dakwah*. Jakarta: Kencana.

Departemen Agama. 1984. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.

Devito, Joseph A. 2001. *The Interpersonal Communication Book*. New York: Longman.

Esposito, John L. (Ed.). 1995. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World, Volume I*. Oxford: Oxford University Press.

Hamidah. 2006. "Gerakan Wanita Islam Indonesia: Suatu Kajian Sosio-Historis Terhadap Aisyiah-Nasyiatul Aisyiah dan Muslimat Fatayat NU", *Makalah* disampaikan pada acara "Annual Conference" di Bandung pada tanggal 26-30 November 2006.

Kurzman, Charles (Ed.). 2002. *Modernist Islam 1840-1940*. Oxford: Oxford University Press.

Mulkhan, Abdul Munir. 1996. *Ideologisasi Gerakan Dakwah*. Yogyakarta: SI Press.

\_\_\_\_\_. 2002. *Teologi Kiri*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Poston, Larry. 1992. *Islamic Da'wah in the West*. New York: Oxford University Press.

Pranaka, A.M.W. dan Vidhyandika. 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.

Thayer, Lee. 1968. *Communication and Communication Systems*. Homewood: Richard D. Irwin, Inc.

*Ulumul Qur'an* No. 6 Vol. II. 1990.

Yunus, Muhammad. 2007. *Bank Kaum Miskin*, Terj. Irfan Nasution. Serpong: Marjin Kiri.